



Pusat Kreativitas Anak Bisa Jadi Solusi Tangani *Klitih*

Pada 2022 ini akan dibangun Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

■ SILVY DIAN SETIAWAN,
 WAHYU SURYANA

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyebut, pusat kreativitas anak dapat menjadi salah satu solusi dalam menghapuskan kejahatan jalanan atau *klitih*. Hingga saat ini, kejahatan jalanan masih menjadi pekerjaan rumah bagi DIY.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi mengatakan, memperbanyak pusat kreativitas anak perlu diperbanyak. Tidak hanya di tingkat provinsi, namun hingga tingkat kelurahan.

Pasalnya, kejahatan jalanan yang terjadi di DIY seringkali melibatkan anak usia sekolah. "Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pusat kreativitas anak sampai tingkat kecamatan atau desa,"

kata Erlina belum lama ini.

Pada 2022 ini, kata Erlina, juga akan dibangun Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Puspaga ini sendiri juga akan ada dari tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan. "Hal ini juga bertujuan agar DIY menjadi provinsi ramah anak dan layak anak, yang saat ini masih berstatus pelopor bisa berubah menjadi layak anak," ujar Erlina.

Mengingat masih terjadinya kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah, berbagai upaya lainnya juga sudah dilakukan oleh Pemda DIY melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di Dinas Sosial DIY, juga ada balai untuk melakukan pembinaan dan menangani anak yang terlibat kejahatan jalanan.

"Kejahatan jalanan juga menjadi pekerjaan rumah bagi kami, memerlukan satu sekolah khusus di samping sudah adanya balai terkait di dinas sosial yang menangani," jelasnya.

Seperti diketahui, DIY juga te-

ngah merancang *boarding school* yang berbasis *foster care* (pengasuhan) untuk mengatasi kejahatan jalanan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan sebelumnya, anak yang terlibat kejahatan jalanan selama ini banyak yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Melalui *boarding school* yang akan dibentuk ini diharapkan anak tetap memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan. *Boarding school* ini direncanakan dibentuk di tanah seluas lima hektare yang ada di Pundong, Sleman.

Kawasan tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat pelatihan gempa dan akan ditata kembali menjadi *boarding school* dengan ditambah beberapa sarana dan prasarana.

"Anak-anak yang orang tuanya tidak menerima lagi, kita berikan fasilitas yang lebih baik, tempat pendidikan maupun tempat training keterampilan dan sebagainya untuk di Pundong itu. Asal dia bersedia untuk tinggal disitu, ya dia bisa tetap bersekolah," kata Sultan.

Sementara itu, Kadiv Humas

Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba mendukung semua langkah pemerintah baik kabupaten/kota maupun provinsi. Termasuk, pihak kepolisian dan lembaga pendidikan dalam rangka meminimalisir, bahkan memberantas aksi-aksi kejahatan jalanan atau *klitih* di DIY.

JPW menawarkan beberapa cara kepada pemerintah dengan harapan dapat memutus mata rantai kejahatan jalanan ini. Pertama, melakukan pemetaan dan pendataan alumni atau senior yang tentunya berpengaruh di geng sekolah atau geng pelajar.

Kedua, pemerintah setempat melakukan pengenalan atau silaturahmi kepada alumni atau senior ini. Pengenalan ini butuh waktu yang tidak sebentar dan tidak ujug-ujug. Ketiga, pemerintah setempat menawarkan atau memberikan kegiatan positif.

Salah satunya aktivitas ekonomi bagi alumni atau senior ini. Keempat, di sela-sela memberi kegiatan positif salah satunya aktivitas ekonomi ini, pemerintah setempat melakukan perbincangan dari hati ke hati kepada alumni atau senior ini.

■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

